



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 telah mendapat persetujuan bersama DPRD pada tanggal 30 Juni 2025 dan telah dilakukan evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1-2870 Tahun 2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa Gubernur bersama DPRD telah melaksanakan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai Hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf b;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6810;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari :
- Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2024;
 - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2024;
 - Neraca per 31 Desember 2024;
 - Laporan Operasional per 31 Desember 2024;
 - Laporan Arus Kas per 31 Desember 2024;
 - Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2024; dan
 - Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2024.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah per 31 Desember 2024.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	4.834.529.892.496,74	
b. Belanja	Rp.	4.734.422.922.878,31	-
Surplus / defisit	Rp.	100.106.969.618,43	
c. Pembiayaan	:		
⇒ Penerimaan	Rp.	325.813.969.843,94	
⇒ Pengeluaran	Rp.	163.091.729.270,00	-
Pembiayaan Netto	Rp.	162.722.240.573,94	

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp.(162.609.881.444,26) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan

	Rp.	4.997.139.773.941,00
--	-----	----------------------
 - b. Realisasi

	Rp.	4.834.529.892.496,74
--	-----	----------------------
 - Selisih lebih / (kurang)

	Rp.	(162.609.881.444,26)
--	-----	----------------------
- (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp.(425.323.146.471,69) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Belanja setelah Perubahan

	Rp.	5.159.746.069.350,00
--	-----	----------------------
 - b. Realisasi

	Rp.	4.734.422.922.878,31
--	-----	----------------------
 - Selisih lebih / (kurang)

	Rp.	(425.323.146.471,69)
--	-----	----------------------
- (3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/ Defisit sejumlah Rp.262.713.265.027,43 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Surplus/ defisit setelah Perubahan

	Rp.	(162.606.295.409,00)
--	-----	----------------------
 - b. Realisasi

	Rp.	100.106.969.618,43
--	-----	--------------------
 - Selisih lebih / (kurang)

	Rp.	262.713.265.027,43
--	-----	--------------------
- (4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp.(271.892.529,06) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan

	Rp.	326.085.862.373,00
--	-----	--------------------
 - b. Realisasi

	Rp.	325.813.969.843,94
--	-----	--------------------
 - Selisih lebih / (kurang)

	Rp.	(271.892.529,06)
--	-----	------------------
- (5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp.(387.837.694,00) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan

	Rp.	163.479.566.964,00
--	-----	--------------------
 - b. Realisasi

	Rp.	163.091.729.270,00
--	-----	--------------------
 - Selisih lebih / (kurang)

	Rp.	(387.837.694,00)
--	-----	------------------
- (6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp.115.945.164,94 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan

	Rp.	162.606.295.409,00
--	-----	--------------------
 - b. Realisasi

	Rp.	162.722.240.573,94
--	-----	--------------------
 - Selisih lebih / (kurang)

	Rp.	115.945.164,94
--	-----	----------------

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	121.211.058.206,94
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	121.170.302.806,94
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp.	262.829.210.192,37
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	(40.755.400,00)
e. Lain – lain	Rp.	0,00
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	262.829.210.192,37

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp.	12.301.641.854.741,77
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	952.013.151.226,47
c. Jumlah Ekuitas	Rp.	11.349.628.703.515,30

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan – LO	Rp.	4.994.570.735.844,16
1. Pendapatan Asli Daerah – LO	Rp.	1.477.556.236.872,46
2. Pendapatan Transfer – LO	Rp.	3.370.839.292.696,00
3. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO	Rp.	146.175.206.275,70
b. Beban – LO	Rp.	4.822.891.412.224,85
1. Beban Pegawai	Rp.	1.658.803.890.345,00
2. Beban Persediaan	Rp.	725.923.131.992,86
3. Beban Jasa	Rp.	606.498.674.477,75
4. Beban Pemeliharaan	Rp.	21.464.897.160,44
5. Beban Perjalanan Dinas	Rp.	142.259.038.890,00
6. Beban Bunga	Rp.	46.969.421.418,00
7. Beban Hibah	Rp.	335.314.631.454,00
8. Beban Bantuan Sosial	Rp.	20.866.608.000,00
9. Beban Penyisihan Piutang	Rp.	2.068.126.349,23
10. Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp.	656.689.569.203,33
11. Beban Transfer	Rp.	598.620.736.826,00
12. Beban Bantuan Keuangan	Rp.	6.306.245.545,00
13. Beban Lain-lain	Rp.	1.106.440.563,24
c. Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	Rp.	171.679.323.619,31
d. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	Rp.	(1.698.242.728,32)
e. Surplus/Defisit – LO	Rp.	169.981.080.890,99

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a.	Saldo Kas awal per 1 Januari Tahun 2024	Rp.	121.412.516.763,94
b.	Arus Kas bersih dari aktivitas operasi	Rp.	632.804.333.017,98
c.	Arus Kas bersih dari aktivitas investasi	Rp.	(328.053.696.362,55)
d.	Arus Kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp.	(163.090.910.670,00)
e.	Arus Kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp.	193.038.131,00
f.	Saldo Kas akhir per 31 Desember Tahun 2024	Rp.	263.265.280.880,37

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f adalah sebagai berikut :

a.	Ekuitas Awal	Rp.	10.064.001.342.526,64
b.	Surplus/Defisit – LO	Rp.	169.981.080.890,99
c.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	Rp.	1.115.646.280.097,67
	- Dampak Perubahan Nilai Persediaan	Rp.	(1.709.876.024,00)
	- Dampak Perubahan Atas Kas	Rp.	(40.755.400,00)
	- Dampak Perubahan Aset Tetap	Rp.	1.216.208.187.496,20
	- Dampak Perubahan Atas Penyusutan	Rp.	(103.422.567.135,88)
	- Dampak Perubahan Atas Investasi	Rp.	(4.372.468.483,49)
	- Dampak Perubahan Atas Utang	Rp.	(45.845.276.759,19)
	- Dampak Perubahan Atas Penyisihan	Rp.	307.378.064,92
	- Dampak Perubahan Atas Aset Lain	Rp.	(4.297.355.449,00)
	- Dampak Perubahan Atas Piutang	Rp.	66.737.365.584,42
	- Dampak Perubahan Atas Penyusutan	Rp.	0,00
	Properti Investasi		
	- Dampak Perubahan Atas Dana	Rp.	(7.918.351.796,31)
	Cadangan		
d.	Jumlah Ekuitas Akhir	Rp.	11.349.628.703.515,30

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah terdiri atas :
- u. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah;
- v. Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah,
- dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Lampiran Laporan Keuangan berupa Laporan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Laporan Keuangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran Laporan Keuangan berupa Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Laporan Keuangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 Agustus 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 19 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

KOSMAS D. LANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025
NOMOR 005

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :
(5-80/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H.
NIP. 19660918 198602 1 001



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
 TAHUN ANGGARAN 2024

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah /(Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
		Rp	Rp	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
	PENDAPATAN	4.997.139.773.941,00	4.834.529.892.496,74	(162.609.881.444,26)	96,75
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	145.389.092.500,00	129.664.124.913,23	(15.724.967.586,77)	89,18
1 01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1.000.000.000,00	671.550.000,00	(328.450.000,00)	67,16
1 01 0 00 0 00 01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.000.000.000,00	671.550.000,00	(328.450.000,00)	67,16
1 02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	138.589.092.500,00	127.092.878.833,59	(11.496.213.666,41)	91,70
1 02 0 00 0 00 01	RSUD Prof Dr W Z Johannes Kupang	130.000.000.000,00	118.158.095.347,59	(11.841.904.652,41)	90,89
1 02 0 00 0 00 02	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.335.259.748,00	354.189.324,00	(1.981.070.424,00)	15,17
1 02 0 00 0 00 03	Dinas Kesehatan	6.253.832.752,00	8.580.594.162,00	2.326.761.410,00	137,21
1 03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.700.000.000,00	1.797.096.079,64	(3.902.903.920,36)	31,53
1 03 1 04 2 10 01	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	5.700.000.000,00	1.797.096.079,64	(3.902.903.920,36)	31,53
1 05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	-	-	-	-
1 05 0 00 0 00 01	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-
1 05 0 00 0 00 02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-
1 06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	100.000.000,00	102.600.000,00	2.600.000,00	102,60
1 06 0 00 0 00 01	Dinas Sosial	100.000.000,00	102.600.000,00	2.600.000,00	102,60
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9.055.000.000,00	4.218.306.458,00	(4.836.693.542,00)	46,59

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah /(Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
		Rp	Rp	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
2 23 2 24 0 00 01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	30.000.000,00	19.999.000,00	(10.001.000,00)	66,66
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	24.310.000.000,00	15.033.748.546,17	(9.276.251.453,83)	61,84
3 25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	9.500.000.000,00	8.324.238.816,17	(1.175.761.183,83)	87,62
3 25 0 00 0 00 01	Dinas Kelautan dan Perikanan	9.500.000.000,00	8.324.238.816,17	(1.175.761.183,83)	87,62
3 26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	310.000.000,00	300.452.200,00	(9.547.800,00)	96,92
3 26 0 00 0 00 01	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	310.000.000,00	300.452.200,00	(9.547.800,00)	96,92
3 27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	14.050.000.000,00	6.097.948.500,00	(7.952.051.500,00)	43,40
3 25 0 00 0 00 01	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	5.000.000.000,00	1.161.228.500,00	(3.838.771.500,00)	23,22
3 25 0 00 0 00 02	Dinas Peternakan	9.050.000.000,00	4.936.720.000,00	(4.113.280.000,00)	54,55
3 29	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-
3 29 0 00 0 00 01	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	-	-	-	-
3 31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	450.000.000,00	311.109.030,00	(138.890.970,00)	69,14
3 31 3 30 2 17 01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	450.000.000,00	311.109.030,00	(138.890.970,00)	69,14
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	400.000.000,00	338.227.581,00	(61.772.419,00)	84,56
4 01	Sekretariat Daerah	400.000.000,00	338.227.581,00	(61.772.419,00)	84,56
4 01 0 00 0 00 01	Sekretariat Daerah	400.000.000,00	338.227.581,00	(61.772.419,00)	84,56
4 02	Sekretariat DPRD	-	-	-	-
4 02 0 00 0 00 01	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	-	-	-
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4.817.970.681.441,00	4.685.240.534.998,34	(132.730.146.442,66)	97,25
5 01	Perencanaan	-	-	-	-
5 01 0 0 0 00 02	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	-	-	-	-
5 01 5 05 0 00 01	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-
5 02	Keuangan	4.800.138.317.886,00	4.681.996.922.998,34	(118.141.394.887,66)	97,54
5 02 0 00 0 00 01	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	1.269.578.927.139,00	1.239.785.402.715,38	(29.793.524.423,62)	97,65

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah /(Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
		Rp	Rp	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
2 07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	170.174.000,00	99.950.000,00	(70.224.000,00)	58,73
2 07 0 0 0 00 01	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	170.174.000,00	99.950.000,00	(70.224.000,00)	58,73
2 08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	150.000.000,00	208.250.000,00	58.250.000,00	138,83
2 08 0 0 0 00 02	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83.350.000,00	136.200.000,00	52.850.000,00	163,41
2 08 2 14 0 00 01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	66.650.000,00	72.050.000,00	5.400.000,00	108,10
2 11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	3.650.000.000,00	1.644.497.761,00	(2.005.502.239,00)	45,05
2 11 3 28 0 00 01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.650.000.000,00	1.644.497.761,00	(2.005.502.239,00)	45,05
2 12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-
2 12 0 0 0 00 01	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil			-	-
2 13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	185.000.000,00	22.521.500,00	(162.478.500,00)	12,17
2 13 2 12 0 00 01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	185.000.000,00	22.521.500,00	(162.478.500,00)	12,17
2 15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	3.870.000.000,00	1.480.982.697,00	(2.389.017.303,00)	38,27
2 15 0 00 0 00 01	Dinas Perhubungan	3.870.000.000,00	1.480.982.697,00	(2.389.017.303,00)	38,27
2 16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	70.000.000,00	67.250.000,00	(2.750.000,00)	96,07
2 16 2 20 2 21 01	Dinas Komunikasi dan Informatika	70.000.000,00	67.250.000,00	(2.750.000,00)	96,07
2 17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	129.826.000,00	84.385.500,00	(45.440.500,00)	65,00
2 17 0 00 0 00 01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	103.276.000,00	50.335.500,00	(52.940.500,00)	48,74
2 17 3 32 0 00 01	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	26.550.000,00	34.050.000,00	7.500.000,00	128,25
2 18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	-	-	-	-
2 18 0 00 0 00 01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-
2 19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	800.000.000,00	590.470.000,00	(209.530.000,00)	73,81
2 19 0 00 0 00 01	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	800.000.000,00	590.470.000,00	(209.530.000,00)	73,81
2 23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	30.000.000,00	19.999.000,00	(10.001.000,00)	66,66

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah /(Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
		Rp	Rp	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
5 02 0 00 0 00 02	Badan Keuangan Daerah	3.530.559.390.747,00	3.442.211.520.282,96	(88.347.870.464,04)	97,50
5 03	Kepegawaian	-	-	-	-
5 03 0 00 0 00 01	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-
5 04	Pendidikan dan Pelatihan	17.682.363.555,00	3.075.712.000,00	(14.606.651.555,00)	17,39
5 04 0 00 0 00 01	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	17.682.363.555,00	3.075.712.000,00	(14.606.651.555,00)	17,39
5 06	Pengelolaan Perbatasan	-	-	-	-
5 06 0 00 0 00 01	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	-	-	-	-
5 07	Pengelolaan Penghubung	150.000.000,00	167.900.000,00	17.900.000,00	111,93
5 07 0 00 0 00 01	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	150.000.000,00	167.900.000,00	17.900.000,00	111,93
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	-	-	-	-
6 01	Inspektorat Daerah	-	-	-	-
6 01 0 00 0 00 01	Inspektorat Daerah	-	-	-	-
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000,00	34.950.000,00	19.950.000,00	233,00
8 01	Kesatuan Bangsa dan Politik	15.000.000,00	34.950.000,00	19.950.000,00	233,00
8 01 0 00 0 00 01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15.000.000,00	34.950.000,00	19.950.000,00	233,00
	BELANJA	5.159.746.069.350,00	4.734.422.922.878,31	(425.323.146.471,69)	91,76
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.886.806.564.855,00	2.730.450.581.705,31	(156.355.983.149,69)	94,58
1 01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	2.078.176.832.686,00	2.034.967.764.809,00	(43.209.067.877,00)	97,92
1 01 0 00 0 00 01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.078.176.832.686,00	2.034.967.764.809,00	(43.209.067.877,00)	97,92
	BELANJA OPERASI	1.762.515.601.838,00	1.725.175.021.556,00	(37.340.580.282,00)	97,88
	Belanja Pegawai	1.119.720.873.477,00	1.101.373.177.519,00	(18.347.695.958,00)	98,36
	Belanja Barang dan Jasa	427.216.082.561,00	406.290.960.608,00	(20.925.121.953,00)	95,10
	Belanja Bunga		-	-	-
	Belanja Subsidi			-	-
	Belanja Hibah	215.578.645.800,00	217.510.883.429,00	1.932.237.629,00	100,90
	Belanja Bantuan Sosial		-	-	-

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah /(Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
		Rp	Rp	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
	BELANJA MODAL	315.661.230.848,00	309.792.743.253,00	(5.868.487.595,00)	98,14
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
1 02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	536.060.797.392,00	459.299.963.585,31	(76.760.833.806,69)	85,68
1 02 0 00 0 00 01	RSUD Prof Dr W Z Johannes Kupang	338.532.780.682,00	277.105.519.151,98	(61.427.261.530,02)	81,85
	BELANJA OPERASI	270.849.323.998,00	238.694.050.172,43	(32.155.273.825,57)	88,13
	Belanja Pegawai	100.327.764.000,00	97.269.447.376,00	(3.058.316.624,00)	96,95
	Belanja Barang dan Jasa	170.521.559.998,00	141.424.602.796,43	(29.096.957.201,57)	82,94
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	67.683.456.684,00	38.411.468.979,55	(29.271.987.704,45)	56,75
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
1 02 0 00 0 00 02	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.874.354.051,00	16.874.350.851,00	(3.200,00)	100,00
	BELANJA OPERASI	16.874.354.051,00	16.874.350.851,00	(3.200,00)	100,00
	Belanja Pegawai	7.682.064.129,00	7.682.064.129,00	-	100,00
	Belanja Barang dan Jasa	9.192.289.922,00	9.192.286.722,00	(3.200,00)	100,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	-	-	-	-
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
1 02 0 00 0 00 03	Dinas Kesehatan	180.653.662.659,00	165.320.093.582,33	(15.333.569.076,67)	91,51
	BELANJA OPERASI	177.518.296.509,00	162.335.980.894,33	(15.182.315.614,67)	91,45
	Belanja Pegawai	14.908.390.772,00	13.480.119.262,00	(1.428.271.510,00)	90,42

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah /(Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
		Rp	Rp	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
	Belanja Barang dan Jasa	162.609.905.737,00	148.855.861.632,33	(13.754.044.104,67)	91,54
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial		-	-	-
	BELANJA MODAL	3.135.366.150,00	2.984.112.688,00	(151.253.462,00)	95,18
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
1 03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	184.280.898.624,00	164.793.562.521,00	(19.487.336.103,00)	89,43
1 03 1 04 2 10 01	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	184.280.898.624,00	164.793.562.521,00	(19.487.336.103,00)	89,43
	BELANJA OPERASI	58.805.654.108,00	49.219.311.611,00	(9.586.342.497,00)	83,70
	Belanja Pegawai	26.104.984.136,00	24.656.670.587,00	(1.448.313.549,00)	94,45
	Belanja Barang dan Jasa	32.700.669.972,00	24.562.641.024,00	(8.138.028.948,00)	75,11
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial		-	-	-
	BELANJA MODAL	125.475.244.516,00	115.574.250.910,00	(9.900.993.606,00)	92,11
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
1 05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	18.509.382.476,00	17.159.135.724,00	(1.350.246.752,00)	92,71
1 05 0 00 0 00 01	Satuan Polisi Pamong Praja	11.632.976.930,00	10.788.163.929,00	(844.813.001,00)	92,74
	BELANJA OPERASI	11.632.976.930,00	10.788.163.929,00	(844.813.001,00)	92,74
	Belanja Pegawai	9.525.879.050,00	8.893.517.996,00	(632.361.054,00)	93,36
	Belanja Barang dan Jasa	2.107.097.880,00	1.894.645.933,00	(212.451.947,00)	89,92
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah /(Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
		Rp	Rp	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
	Belanja Bantuan Sosial		-	-	-
	BELANJA MODAL	-	-	-	-
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
1 05 0 00 0 00 02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.876.405.546,00	6.370.971.795,00	(505.433.751,00)	92,65
	BELANJA OPERASI	6.876.405.546,00	6.370.971.795,00	(505.433.751,00)	92,65
	Belanja Pegawai	4.603.048.000,00	4.187.374.673,00	(415.673.327,00)	90,97
	Belanja Barang dan Jasa	2.273.357.546,00	2.183.597.122,00	(89.760.424,00)	96,05
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial		-	-	-
	BELANJA MODAL	-	-	-	-
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
1 06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	69.778.653.677,00	54.230.155.066,00	(15.548.498.611,00)	77,72
1 06 0 00 0 00 01	Dinas Sosial	69.778.653.677,00	54.230.155.066,00	(15.548.498.611,00)	77,72
	BELANJA OPERASI	53.083.029.991,00	48.912.090.316,00	(4.170.939.675,00)	92,14
	Belanja Pegawai	15.993.306.000,00	14.932.731.898,00	(1.060.574.102,00)	93,37
	Belanja Barang dan Jasa	22.042.762.991,00	20.190.462.418,00	(1.852.300.573,00)	91,60
	Belanja Bunga		-	-	-
	Belanja Subsidi			-	-
	Belanja Hibah	350.000.000,00	242.500.000,00	(107.500.000,00)	69,29
	Belanja Bantuan Sosial	14.696.961.000,00	13.546.396.000,00	(1.150.565.000,00)	92,17
	BELANJA MODAL	16.695.623.686,00	5.318.064.750,00	(11.377.558.936,00)	31,85
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	269.672.204.311,00	238.299.340.555,00	(31.372.863.756,00)	88,37

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah /(Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
		Rp	Rp	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
2 07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	11.302.503.357,00	10.546.730.851,00	(755.772.506,00)	93,31
2 07 0 0 0 00 01	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	11.302.503.357,00	10.546.730.851,00	(755.772.506,00)	93,31
	BELANJA OPERASI	11.210.311.065,00	10.455.605.851,00	(754.705.214,00)	93,27
	Belanja Pegawai	8.360.910.220,00	7.885.327.100,00	(475.583.120,00)	94,31
	Belanja Barang dan Jasa	2.849.400.845,00	2.570.278.751,00	(279.122.094,00)	90,20
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	92.192.292,00	91.125.000,00	(1.067.292,00)	98,84
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2 08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.628.520.883,00	7.763.151.954,00	(865.368.929,00)	89,97
2 08 0 0 0 00 02	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.675.506.017,00	5.810.137.089,00	(865.368.928,00)	87,04
	BELANJA OPERASI	6.222.726.967,00	5.453.702.867,00	(769.024.100,00)	87,64
	Belanja Pegawai	3.141.503.000,00	2.837.658.305,00	(303.844.695,00)	90,33
	Belanja Barang dan Jasa	2.581.223.967,00	2.116.044.562,00	(465.179.405,00)	81,98
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	500.000.000,00	500.000.000,00	-	100,00
	BELANJA MODAL	452.779.050,00	356.434.222,00	(96.344.828,00)	78,72
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2 08 2 14 0 00 01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.953.014.866,00	1.953.014.865,00	(1,00)	100,00
	BELANJA OPERASI	1.953.014.866,00	1.953.014.865,00	(1,00)	100,00
	Belanja Pegawai	1.542.756.173,00	1.542.756.173,00	-	100,00
	Belanja Barang dan Jasa	410.258.693,00	410.258.692,00	(1,00)	100,00

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah /(Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
		Rp	Rp	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	-	-	-	-
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2 11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	102.207.600.783,00	92.140.398.272,00	(10.067.202.511,00)	90,15
2 11 3 28 0 00 01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	102.207.600.783,00	92.140.398.272,00	(10.067.202.511,00)	90,15
	BELANJA OPERASI	102.136.493.991,00	92.132.154.272,00	(10.004.339.719,00)	90,20
	Belanja Pegawai	70.568.092.000,00	66.977.991.163,00	(3.590.100.837,00)	94,91
	Belanja Barang dan Jasa	31.568.401.991,00	25.154.163.109,00	(6.414.238.882,00)	79,68
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	71.106.792,00	8.244.000,00	(62.862.792,00)	11,59
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2 12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.636.094.101,00	1.554.096.147,00	(4.081.997.954,00)	27,57
2 12 0 0 0 00 01	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5.636.094.101,00	1.554.096.147,00	(4.081.997.954,00)	27,57
	BELANJA OPERASI	4.746.868.501,00	945.759.896,00	(3.801.108.605,00)	19,92
	Belanja Pegawai	3.806.314.000,00	370.924.086,00	(3.435.389.914,00)	9,74
	Belanja Barang dan Jasa	940.554.501,00	574.835.810,00	(365.718.691,00)	61,12
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah /(Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
		Rp	Rp	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
	BELANJA MODAL	889.225.600,00	608.336.251,00	(280.889.349,00)	68,41
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2 13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	9.306.216.908,00	8.289.020.300,00	(1.017.196.608,00)	89,07
2 13 2 12 0 00 01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.306.216.908,00	8.289.020.300,00	(1.017.196.608,00)	89,07
	BELANJA OPERASI	9.291.383.908,00	8.289.020.300,00	(1.002.363.608,00)	89,21
	Belanja Pegawai	5.397.863.000,00	5.024.979.407,00	(372.883.593,00)	93,09
	Belanja Barang dan Jasa	3.893.520.908,00	3.264.040.893,00	(629.480.015,00)	83,83
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	14.833.000,00	-	(14.833.000,00)	0,00
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2 15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	40.917.744.212,00	37.384.215.153,00	(3.533.529.059,00)	91,36
2 15 0 00 0 00 01	Dinas Perhubungan	40.917.744.212,00	37.384.215.153,00	(3.533.529.059,00)	91,36
	BELANJA OPERASI	18.870.161.682,00	16.109.915.310,00	(2.760.246.372,00)	85,37
	Belanja Pegawai	11.513.987.000,00	10.962.721.830,00	(551.265.170,00)	95,21
	Belanja Barang dan Jasa	7.356.174.682,00	5.147.193.480,00	(2.208.981.202,00)	69,97
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	22.047.582.530,00	21.274.299.843,00	(773.282.687,00)	96,49
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-

Kode							Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah /(Berkurang)	
								Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
								Rp	Rp	(Rp)	%
1							2	3	4	5 = (4-3)	6
2	16						Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	15.697.624.614,00	14.231.348.341,00	(1.466.276.273,00)	90,66
2	16	2	20	2	21	01	Dinas Komunikasi dan Informatika	15.697.624.614,00	14.231.348.341,00	(1.466.276.273,00)	90,66
							BELANJA OPERASI	14.282.382.911,00	13.449.768.592,00	(832.614.319,00)	94,17
							Belanja Pegawai	6.059.182.000,00	5.732.663.592,00	(326.518.408,00)	94,61
							Belanja Barang dan Jasa	7.123.200.911,00	6.617.246.192,00	(505.954.719,00)	92,90
							Belanja Bunga		-	-	-
							Belanja Subsidi			-	-
							Belanja Hibah	1.100.000.000,00	1.099.858.808,00	(141.192,00)	99,99
							Belanja Bantuan Sosial		-	-	-
							BELANJA MODAL	1.415.241.703,00	781.579.749,00	(633.661.954,00)	55,23
							BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
							BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2	17						Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	20.276.325.654,00	17.353.687.037,00	(2.922.638.617,00)	85,59
2	17	0	00	0	00	01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	14.030.146.908,00	11.107.509.291,00	(2.922.637.617,00)	79,17
							BELANJA OPERASI	13.938.791.324,00	11.017.089.291,00	(2.921.702.033,00)	79,04
							Belanja Pegawai	2.199.784.780,00	1.822.167.451,00	(377.617.329,00)	82,83
							Belanja Barang dan Jasa	3.159.006.544,00	2.739.921.840,00	(419.084.704,00)	86,73
							Belanja Bunga		-	-	-
							Belanja Subsidi		-	-	-
							Belanja Hibah			-	-
							Belanja Bantuan Sosial	8.580.000.000,00	6.455.000.000,00	(2.125.000.000,00)	75,23
							BELANJA MODAL	91.355.584,00	90.420.000,00	(935.584,00)	98,98
							BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
							BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2	17	3	32	0	00	01	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.246.178.746,00	6.246.177.746,00	(1.000,00)	100,00
							BELANJA OPERASI	6.230.530.746,00	6.230.529.746,00	(1.000,00)	100,00
							Belanja Pegawai	5.223.985.786,00	5.223.985.786,00	-	100,00
							Belanja Barang dan Jasa	1.006.544.960,00	1.006.543.960,00	(1.000,00)	100,00

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah /(Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
		Rp	Rp	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	15.648.000,00	15.648.000,00	-	100,00
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2 18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	9.615.756.908,00	8.739.832.048,00	(875.924.860,00)	90,89
2 18 0 00 0 00 01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.615.756.908,00	8.739.832.048,00	(875.924.860,00)	90,89
	BELANJA OPERASI	9.502.312.538,00	8.629.609.188,00	(872.703.350,00)	90,82
	Belanja Pegawai	5.586.505.000,00	5.127.905.161,00	(458.599.839,00)	91,79
	Belanja Barang dan Jasa	3.915.807.538,00	3.501.704.027,00	(414.103.511,00)	89,42
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	113.444.370,00	110.222.860,00	(3.221.510,00)	97,16
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2 19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	35.150.497.235,00	30.168.261.616,00	(4.982.235.619,00)	85,83
2 19 0 00 0 00 01	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	35.150.497.235,00	30.168.261.616,00	(4.982.235.619,00)	85,83
	BELANJA OPERASI	35.049.250.235,00	30.109.471.626,00	(4.939.778.609,00)	85,91
	Belanja Pegawai	8.516.785.000,00	7.639.958.003,00	(876.826.997,00)	89,70
	Belanja Barang dan Jasa	10.536.465.237,00	7.886.616.875,00	(2.649.848.362,00)	74,85
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	10.025.999.998,00	9.992.896.748,00	(33.103.250,00)	99,67
	Belanja Bantuan Sosial	5.970.000.000,00	4.590.000.000,00	(1.380.000.000,00)	76,88
	BELANJA MODAL	101.247.000,00	58.789.990,00	(42.457.010,00)	58,07

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah /(Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
		Rp	Rp	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2 23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	10.933.319.656,00	10.128.598.836,00	(804.720.820,00)	92,64
2 23 2 24 0 00 01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	10.933.319.656,00	10.128.598.836,00	(804.720.820,00)	92,64
	BELANJA OPERASI	10.721.140.368,00	9.916.628.836,00	(804.511.532,00)	92,50
	Belanja Pegawai	7.676.849.000,00	7.242.726.985,00	(434.122.015,00)	94,35
	Belanja Barang dan Jasa	3.044.291.368,00	2.673.901.851,00	(370.389.517,00)	87,83
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	212.179.288,00	211.970.000,00	(209.288,00)	99,90
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	267.393.188.922,00	249.393.127.920,00	(18.000.061.002,00)	93,27
3 25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	47.151.572.967,00	44.466.712.289,00	(2.684.860.678,00)	94,31
3 25 0 00 0 00 01	Dinas Kelautan dan Perikanan	47.151.572.967,00	44.466.712.289,00	(2.684.860.678,00)	94,31
	BELANJA OPERASI	27.252.116.967,00	24.893.673.289,00	(2.358.443.678,00)	91,35
	Belanja Pegawai	12.869.477.999,00	11.955.058.873,00	(914.419.126,00)	92,89
	Belanja Barang dan Jasa	14.382.638.968,00	12.938.614.416,00	(1.444.024.552,00)	89,96
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	19.899.456.000,00	19.573.039.000,00	(326.417.000,00)	98,36
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
3 26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	10.435.071.360,00	9.808.063.884,00	(627.007.476,00)	93,99

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah /(Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
		Rp	Rp	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
3 26 0 00 0 00 01	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	10.435.071.360,00	9.808.063.884,00	(627.007.476,00)	93,99
	BELANJA OPERASI	10.300.988.360,00	9.775.103.026,00	(525.885.334,00)	94,89
	Belanja Pegawai	6.685.310.000,00	6.473.392.057,00	(211.917.943,00)	96,83
	Belanja Barang dan Jasa	3.615.678.360,00	3.301.710.969,00	(313.967.391,00)	91,32
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	134.083.000,00	32.960.858,00	(101.122.142,00)	24,58
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
3 27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	83.772.149.955,00	75.462.598.317,00	(8.309.551.638,00)	90,08
3 25 0 00 0 00 01	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	58.710.915.102,00	53.392.333.571,00	(5.318.581.531,00)	90,94
	BELANJA OPERASI	54.667.421.482,00	49.624.470.658,00	(5.042.950.824,00)	90,78
	Belanja Pegawai	31.902.641.000,00	29.948.172.682,00	(1.954.468.318,00)	93,87
	Belanja Barang dan Jasa	22.664.780.482,00	19.676.297.976,00	(2.988.482.506,00)	86,81
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)	0,00
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	4.043.493.620,00	3.767.862.913,00	(275.630.707,00)	93,18
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
3 25 0 00 0 00 02	Dinas Peternakan	25.061.234.853,00	22.070.264.746,00	(2.990.970.107,00)	88,07
	BELANJA OPERASI	24.316.263.457,00	21.566.421.634,00	(2.749.841.823,00)	88,69
	Belanja Pegawai	15.224.645.000,00	14.139.105.961,00	(1.085.539.039,00)	92,87
	Belanja Barang dan Jasa	9.091.618.457,00	7.427.315.673,00	(1.664.302.784,00)	81,69
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah /(Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
		Rp	Rp	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial		-	-	-
	BELANJA MODAL	744.971.396,00	503.843.112,00	(241.128.284,00)	67,63
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
3 29	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	105.262.898.120,00	101.078.828.833,00	(4.184.069.287,00)	96,03
3 29 0 00 0 00 01	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	105.262.898.120,00	101.078.828.833,00	(4.184.069.287,00)	96,03
	BELANJA OPERASI	105.250.249.120,00	101.066.179.833,00	(4.184.069.287,00)	96,02
	Belanja Pegawai	10.282.911.000,00	9.487.313.029,00	(795.597.971,00)	92,26
	Belanja Barang dan Jasa	94.967.338.120,00	91.578.866.804,00	(3.388.471.316,00)	96,43
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial		-	-	-
	BELANJA MODAL	12.649.000,00	12.649.000,00	-	100,00
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
3 31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	20.771.496.520,00	18.576.924.597,00	(2.194.571.923,00)	89,43
3 31 3 30 2 17 01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	20.771.496.520,00	18.576.924.597,00	(2.194.571.923,00)	89,43
	BELANJA OPERASI	13.668.063.840,00	12.773.809.597,00	(894.254.243,00)	93,46
	Belanja Pegawai	6.036.549.000,00	5.762.381.199,00	(274.167.801,00)	95,46
	Belanja Barang dan Jasa	7.631.514.840,00	7.011.428.398,00	(620.086.442,00)	91,87
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial		-	-	-
	BELANJA MODAL	7.103.432.680,00	5.803.115.000,00	(1.300.317.680,00)	81,69
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah /(Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
		Rp	Rp	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	256.477.209.440,00	220.118.517.703,00	(36.358.691.737,00)	85,82
4 01	Sekretariat Daerah	107.023.633.233,00	94.823.055.879,00	(12.200.577.354,00)	88,60
4 01 0 00 0 00 01	Sekretariat Daerah	107.023.633.233,00	94.823.055.879,00	(12.200.577.354,00)	88,60
	BELANJA OPERASI	104.555.337.783,00	92.513.253.106,00	(12.042.084.677,00)	88,48
	Belanja Pegawai	38.430.061.027,00	36.630.869.646,00	(1.799.191.381,00)	95,32
	Belanja Barang dan Jasa	57.577.838.756,00	48.971.967.220,00	(8.605.871.536,00)	85,05
	Belanja Bunga		-	-	-
	Belanja Subsidi			-	-
	Belanja Hibah	2.573.438.000,00	2.371.416.240,00	(202.021.760,00)	92,15
	Belanja Bantuan Sosial	5.974.000.000,00	4.539.000.000,00	(1.435.000.000,00)	75,98
	BELANJA MODAL	2.468.295.450,00	2.309.802.773,00	(158.492.677,00)	93,58
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
4 02	Sekretariat DPRD	149.453.576.207,00	125.295.461.824,00	(24.158.114.383,00)	83,84
4 02 0 00 0 00 01	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	149.453.576.207,00	125.295.461.824,00	(24.158.114.383,00)	83,84
	BELANJA OPERASI	147.109.882.591,00	123.302.030.621,00	(23.807.851.970,00)	83,82
	Belanja Pegawai	54.894.038.000,00	53.284.741.601,00	(1.609.296.399,00)	97,07
	Belanja Barang dan Jasa	92.215.844.591,00	70.017.289.020,00	(22.198.555.571,00)	75,93
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial		-	-	-
	BELANJA MODAL	2.343.693.616,00	1.993.431.203,00	(350.262.413,00)	85,06
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.097.009.826.865,00	966.309.953.637,00	(130.699.873.228,00)	88,09
5 01	Perencanaan	23.424.785.051,00	18.400.117.785,00	(5.024.667.266,00)	78,55

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah						Jumlah (Rp)		Bertambah /(Berkurang)	
							Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
							Rp	Rp	(Rp)	%
1	2						3	4	5 = (4-3)	6
5 01 0 0 0 00 02	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah						17.154.403.678,00	12.129.736.412,00	(5.024.667.266,00)	70,71
	BELANJA OPERASI						17.030.855.678,00	12.129.736.412,00	(4.901.119.266,00)	71,22
	Belanja Pegawai						6.507.156.000,00	6.250.614.736,00	(256.541.264,00)	96,06
	Belanja Barang dan Jasa						10.523.699.678,00	5.879.121.676,00	(4.644.578.002,00)	55,87
	Belanja Bunga						-	-	-	-
	Belanja Subsidi						-	-	-	-
	Belanja Hibah						-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial						-	-	-	-
	BELANJA MODAL						123.548.000,00	-	(123.548.000,00)	0,00
	BELANJA TIDAK TERDUGA						-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER						-	-	-	-
5 01 5 05 0 00 01	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah						6.270.381.373,00	6.270.381.373,00	-	100,00
	BELANJA OPERASI						6.270.381.373,00	6.270.381.373,00	-	100,00
	Belanja Pegawai						3.550.770.048,00	3.550.770.048,00	-	100,00
	Belanja Barang dan Jasa						2.719.611.325,00	2.719.611.325,00	-	100,00
	Belanja Bunga						-	-	-	-
	Belanja Subsidi						-	-	-	-
	Belanja Hibah						-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial						-	-	-	-
	BELANJA MODAL						-	-	-	-
	BELANJA TIDAK TERDUGA						-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER						-	-	-	-
5 02	Keuangan						1.022.289.775.238,00	903.370.960.954,00	(118.918.814.284,00)	88,37
5 02 0 00 0 00 01	Badan Pendapatan dan Aset Daerah						86.717.206.669,00	75.221.753.660,00	(11.495.453.009,00)	86,74
	BELANJA OPERASI						82.724.054.469,00	72.971.141.292,00	(9.752.913.177,00)	88,21
	Belanja Pegawai						41.874.140.061,00	36.614.227.533,00	(5.259.912.528,00)	87,44
	Belanja Barang dan Jasa						40.849.914.408,00	36.356.913.759,00	(4.493.000.649,00)	89,00
	Belanja Bunga						-	-	-	-

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah /(Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
		Rp	Rp	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	3.993.152.200,00	2.250.612.368,00	(1.742.539.832,00)	56,36
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
5 02 0 00 0 00 02	Badan Keuangan Daerah	935.572.568.569,00	828.149.207.294,00	(107.423.361.275,00)	88,52
	BELANJA OPERASI	97.714.832.355,00	93.962.679.639,00	(3.752.152.716,00)	96,16
	Belanja Pegawai	7.561.641.960,00	7.204.135.597,00	(357.506.363,00)	95,27
	Belanja Barang dan Jasa	32.219.926.753,00	29.498.318.181,00	(2.721.608.572,00)	91,55
	Belanja Bunga	57.933.263.642,00	57.260.225.861,00	(673.037.781,00)	98,84
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	425.354.131,00	395.645.675,00	(29.708.456,00)	93,02
	BELANJA TIDAK TERDUGA	45.890.056.001,00	3.331.110.441,00	(42.558.945.560,00)	7,26
	BELANJA TRANSFER	791.542.326.082,00	730.459.771.539,00	(61.082.554.543,00)	92,28
5 03	Kepegawaian	12.919.713.000,00	12.180.996.458,00	(738.716.542,00)	94,28
5 03 0 00 0 00 01	Badan Kepegawaian Daerah	12.919.713.000,00	12.180.996.458,00	(738.716.542,00)	94,28
	BELANJA OPERASI	12.818.076.000,00	12.080.978.018,00	(737.097.982,00)	94,25
	Belanja Pegawai	7.547.238.000,00	7.319.666.648,00	(227.571.352,00)	96,98
	Belanja Barang dan Jasa	5.270.838.000,00	4.761.311.370,00	(509.526.630,00)	90,33
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	101.637.000,00	100.018.440,00	(1.618.560,00)	98,41
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah /(Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
		Rp	Rp	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
5 04	Pendidikan dan Pelatihan	20.624.014.536,00	16.165.020.985,00	(4.458.993.551,00)	78,38
5 04 0 00 0 00 01	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	20.624.014.536,00	16.165.020.985,00	(4.458.993.551,00)	78,38
	BELANJA OPERASI	20.287.710.536,00	15.848.803.985,00	(4.438.906.551,00)	78,12
	Belanja Pegawai	9.514.097.000,00	8.053.175.366,00	(1.460.921.634,00)	84,64
	Belanja Barang dan Jasa	10.773.613.536,00	7.795.628.619,00	(2.977.984.917,00)	72,36
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	336.304.000,00	316.217.000,00	(20.087.000,00)	94,03
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
5 06	Pengelolaan Perbatasan	6.679.526.840,00	5.835.318.057,00	(844.208.783,00)	87,36
5 06 0 00 0 00 01	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	6.679.526.840,00	5.835.318.057,00	(844.208.783,00)	87,36
	BELANJA OPERASI	6.679.526.840,00	5.835.318.057,00	(844.208.783,00)	87,36
	Belanja Pegawai	3.990.853.000,00	3.760.933.190,00	(229.919.810,00)	94,24
	Belanja Barang dan Jasa	2.688.673.840,00	2.074.384.867,00	(614.288.973,00)	77,15
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	-	-	-	-
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
5 07	Pengelolaan Penghubung	11.072.012.200,00	10.357.539.398,00	(714.472.802,00)	93,55
5 07 0 00 0 00 01	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	11.072.012.200,00	10.357.539.398,00	(714.472.802,00)	93,55
	BELANJA OPERASI	9.974.912.712,00	9.285.878.698,00	(689.034.014,00)	93,09
	Belanja Pegawai	3.029.939.000,00	2.851.896.327,00	(178.042.673,00)	94,12
	Belanja Barang dan Jasa	6.944.973.712,00	6.433.982.371,00	(510.991.341,00)	92,64

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah /(Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
		Rp	Rp	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	1.097.099.488,00	1.071.660.700,00	(25.438.788,00)	97,68
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	19.430.320.869,00	18.089.000.695,00	(1.341.320.174,00)	93,10
6 01	Inspektorat Daerah	19.430.320.869,00	18.089.000.695,00	(1.341.320.174,00)	93,10
6 01 0 00 0 00 01	Inspektorat Daerah	19.430.320.869,00	18.089.000.695,00	(1.341.320.174,00)	93,10
	BELANJA OPERASI	19.375.354.473,00	18.035.357.299,00	(1.339.997.174,00)	93,08
	Belanja Pegawai	9.594.570.000,00	9.253.625.747,00	(340.944.253,00)	96,45
	Belanja Barang dan Jasa	9.780.784.473,00	8.781.731.552,00	(999.052.921,00)	89,79
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	54.966.396,00	53.643.396,00	(1.323.000,00)	97,59
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	362.956.754.088,00	311.762.400.663,00	(51.194.353.425,00)	85,90
8 01	Kesatuan Bangsa dan Politik	362.956.754.088,00	311.762.400.663,00	(51.194.353.425,00)	85,90
8 01 0 00 0 00 01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	362.956.754.088,00	311.762.400.663,00	(51.194.353.425,00)	85,90
	BELANJA OPERASI	362.472.932.448,00	311.674.809.475,00	(50.798.122.973,00)	85,99
	Belanja Pegawai	4.061.833.000,00	3.688.851.365,00	(372.981.635,00)	90,82
	Belanja Barang dan Jasa	5.579.297.048,00	4.499.112.710,00	(1.080.184.338,00)	80,64
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah /(Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
		Rp	Rp	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
	Belanja Hibah	352.831.802.400,00	303.486.845.400,00	(49.344.957.000,00)	86,01
	Belanja Bantuan Sosial		-	-	-
	BELANJA MODAL	483.821.640,00	87.591.188,00	(396.230.452,00)	18,10
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
	(SURPLUS/DEFISIT)	(162.606.295.409,00)	100.106.969.618,43	262.713.265.027,43	(61,56)

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H.
 NIP. 19660918 198602 1 001

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
2	3	4	5	6
PENDAPATAN DAERAH				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Pendapatan Pajak Daerah	1.242.171.027.017,00	1.222.849.908.091,55	98,44	1.154.822.144.629,04
Pendapatan Retribusi Daerah	60.567.956.055,00	27.136.719.369,17	44,80	44.202.047.251,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	37.064.277.605,00	31.749.907.192,00	85,66	60.645.290.853,00
Lain-lain PAD yang Sah	241.978.348.264,00	169.703.623.448,02	70,13	167.365.684.558,22
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	1.581.781.608.941,00	1.451.440.158.100,74	91,76	1.427.035.167.291,26
PENDAPATAN TRANSFER				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil	51.408.655.000,00	61.216.765.770,00	119,08	56.371.680.113,00
Dana Alokasi Umum	1.984.240.864.000,00	1.976.058.968.384,00	99,59	1.876.608.978.000,00
Dana Alokasi Khusus	1.365.813.341.000,00	1.331.571.219.542,00	97,49	1.261.698.310.342,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	3.401.462.860.000,00	3.368.846.953.696,00	99,04	3.194.678.968.455,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
Dana Insentif Fiskal	11.346.961.000,00	11.346.961.000,00	100,00	
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	11.346.961.000,00	11.346.961.000,00	100,00	-
Total Pendapatan Transfer	3.412.809.821.000,00	3.380.193.914.696,00	99,04	3.194.678.968.455,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Pendapatan Hibah	2.548.344.000,00	2.895.819.700,00	113,64	3.183.251.449,00
Jumlah Pendapatan Lain-Lain yang Sah	2.548.344.000,00	2.895.819.700,00	113,64	3.183.251.449,00
JUMLAH PENDAPATAN	4.997.139.773.941,00	4.834.529.892.496,74	96,75	4.624.897.387.195,26

Uraian	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
BELANJA DAERAH				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	1.712.018.697.618,00	1.657.095.800.087,00	96,79	1.511.605.996.659,00
Belanja Barang dan Jasa	1.336.547.164.099,00	1.187.981.415.203,76	88,88	1.207.862.533.807,27
Belanja Bunga	57.933.263.642,00	57.260.225.861,00	98,84	62.884.046.386,00
Belanja Hibah	582.559.886.198,00	534.704.400.625,00	91,79	379.445.844.651,00
Belanja Bantuan Sosial	35.720.961.000,00	29.630.396.000,00	82,95	23.544.900.000,00
Jumlah Belanja Operasi	3.724.779.972.557,00	3.466.672.237.776,76	93,07	3.185.343.321.503,27
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah			-	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	181.316.183.435,00	176.436.362.807,55	97,31	193.621.780.165,50
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	263.734.583.322,00	216.584.489.838,00	82,12	248.250.770.111,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	123.540.702.726,00	114.279.541.753,00	92,50	155.271.232.138,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	28.809.245.227,00	26.659.408.723,00	92,54	24.198.241.271,00
Belanja Modal Aset Lainnya	133.000.000,00		0,00	
Jumlah Belanja Modal	597.533.714.710,00	533.959.803.121,55	89,36	621.342.023.685,50
BELANJA TIDAK TERDUGA				
Belanja Tidak Terduga	45.890.056.001,00	3.331.110.441,00	7,26	707.344.000,00
Jumlah Belanja Tak Terduga	45.890.056.001,00	3.331.110.441,00	7,26	707.344.000,00
Jumlah Belanja	4.368.203.743.268,00	4.003.963.151.339,31	91,66	3.807.392.689.188,77
TRANSFER				
TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA			-	
Belanja Bagi Hasil Pajak	783.908.562.082,00	724.153.525.994,00	92,38	653.517.358.069,00
Belanja Bantuan Keuangan	7.633.764.000,00	6.306.245.545,00	82,61	
Jumlah Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota	791.542.326.082,00	730.459.771.539,00	92,28	653.517.358.069,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	5.159.746.069.350,00	4.734.422.922.878,31	91,76	4.460.910.047.257,77
SURPLUS/(DEFISIT)	(162.606.295.409,00)	100.106.969.618,43	(61,56)	163.987.339.937,49
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TahunSebelumnya	121.211.058.207,00	121.170.302.806,94	99,97	83.195.862.278,15
Pencairan Dana Cadangan	203.511.200.000,00	203.511.200.000,00	100,00	136.488.800.000,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.363.604.166,00	1.132.467.037,00	83,05	2.318.322.197,30
Jumlah Penerimaan	326.085.862.373,00	325.813.969.843,94	99,92	222.002.984.475,45

Uraian	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pembentukan Dana Cadangan	-		-	240.000.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	163.479.566.964,00	163.091.729.270,00	99,76	24.779.266.206,00
Jumlah Pengeluaran	163.479.566.964,00	163.091.729.270,00	99,76	264.779.266.206,00
PEMBIAYAAN NETTO	162.606.295.409,00	162.722.240.573,94	100,07	(42.776.281.730,55)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	262.829.210.192,37	-	121.211.058.206,94

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H.
NIP. 19660918 198602 1 001

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.0.00.0.00.01. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	1.000.000.000,00	671.550.000,00	(328.450.000,00)	67,15	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.000.000.000,00	671.550.000,00	(328.450.000,00)	67,15	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.02.	Retribusi Daerah	1.000.000.000,00	671.550.000,00	(328.450.000,00)	67,15	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.000.000.000,00	671.550.000,00	(328.450.000,00)	67,15	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5.	BELANJA DAERAH	2.078.176.832.686,00	2.034.967.764.809,00	43.209.067.877,00	97,92	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.	X.JXX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.183.846.799.021,00	1.161.422.288.339,00	22.424.510.682,00	98,10	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.01.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	146.000.000,00	142.408.532,00	3.591.468,00	97,54	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.01.01.01	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.01.01.015.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.01.01.01.02	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA- SKPD	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.01.01.025.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.01.01.01.03	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.01.01.035.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 8.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
ORGANISASI : 8.01.0.00.0.00.01. - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	15.000.000,00	34.950.000,00	19.950.000,00	233,00	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15.000.000,00	34.950.000,00	19.950.000,00	233,00	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.02.	Retribusi Daerah	15.000.000,00	34.950.000,00	19.950.000,00	233,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	15.000.000,00	34.950.000,00	19.950.000,00	233,00	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5.	BELANJA DAERAH	362.956.754.088,00	311.762.400.663,00	51.194.353.425,00	85,89	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.286.002.478,00	4.391.761.893,00	894.240.585,00	83,08	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	132.415.000,00	113.509.900,00	18.905.100,00	85,72	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.01.01.05	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	14.600.000,00	12.395.000,00	2.205.000,00	84,89	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.01.01.055.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	14.600.000,00	12.395.000,00	2.205.000,00	84,89	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.01.01.06	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	103.091.000,00	90.063.900,00	13.027.100,00	87,36	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.01.01.065.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	103.091.000,00	90.063.900,00	13.027.100,00	87,36	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.01.01.07	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	14.724.000,00	11.051.000,00	3.673.000,00	75,05	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.01.01.075.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	14.724.000,00	11.051.000,00	3.673.000,00	75,05	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.01.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.862.303.000,00	3.498.761.365,00	363.541.635,00	90,58	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.01.02.01	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.862.303.000,00	3.498.761.365,00	363.541.635,00	90,58	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.01.02.015.1.01.	Belanja Pegawai	3.862.303.000,00	3.498.761.365,00	363.541.635,00	90,58	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.01.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	204.881.554,00	148.599.730,00	56.281.824,00	72,52	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.01.06.01	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	9.189.000,00	2.888.300,00	6.300.700,00	31,43	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.01.06.015.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.189.000,00	2.888.300,00	6.300.700,00	31,43	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.01.06.05	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	22.956.554,00	20.278.050,00	2.678.504,00	88,33	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.01.06.055.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	22.956.554,00	20.278.050,00	2.678.504,00	88,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.01.06.07	PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	59.654.000,00	49.868.450,00	9.785.550,00	83,59	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.01.06.075.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	59.654.000,00	49.868.450,00	9.785.550,00	83,59	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.01.06.08	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	12.900.000,00	8.327.050,00	4.572.950,00	64,55	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.01.06.085.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.900.000,00	8.327.050,00	4.572.950,00	64,55	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.01.06.09	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	100.182.000,00	67.237.880,00	32.944.120,00	67,11	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.01.06.095.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	100.182.000,00	67.237.880,00	32.944.120,00	67,11	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.01.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	140.318.000,00	87.591.188,00	52.726.812,00	62,42	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.01.07.07	PENGADAAN ASET TETAP LAINNYA	140.318.000,00	87.591.188,00	52.726.812,00	62,42	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.01.07.075.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.496.360,00	-	9.496.360,00	-	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.01.07.075.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	130.821.640,00	87.591.188,00	43.230.452,00	66,95	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.01.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	510.217.924,00	483.368.160,00	26.849.764,00	94,73	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.01.08.01	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.160.000,00	2.200.000,00	960.000,00	69,62	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.01.08.015.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.160.000,00	2.200.000,00	960.000,00	69,62	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.01.08.02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	11.930.000,00	1.520.000,00	10.410.000,00	12,74	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.01.08.025.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.930.000,00	1.520.000,00	10.410.000,00	12,74	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.01.08.03	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	8.757.860,00	5.398.000,00	3.359.860,00	61,63	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.01.08.035.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.757.860,00	5.398.000,00	3.359.860,00	61,63	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.01.08.04	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	486.370.064,00	474.250.160,00	12.119.904,00	97,50	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.01.08.045.1.01.	Belanja Pegawai	199.530.000,00	190.090.000,00	9.440.000,00	95,26	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.01.08.045.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	286.840.064,00	284.160.160,00	2.679.904,00	99,06	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.01.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	435.867.000,00	59.931.550,00	375.935.450,00	13,74	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.01.09.01	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	4.000.000,00	1.529.950,00	2.470.050,00	38,24	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.01.09.015.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	1.529.950,00	2.470.050,00	38,24	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.01.09.06	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	78.867.000,00	58.401.600,00	20.465.400,00	74,05	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.01.09.065.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	78.867.000,00	58.401.600,00	20.465.400,00	74,05	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.01.09.09	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	353.000.000,00	-	353.000.000,00	-	
0.00.8.01.0.00.0.00.01.01.01.09.095.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	353.000.000,00	-	353.000.000,00	-	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.452.950.010,00	2.249.093.640,00	203.856.370,00	91,68	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.02.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.452.950.010,00	2.249.093.640,00	203.856.370,00	91,68	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.02.01.02	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BHINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	59.900.000,00	21.858.350,00	38.041.650,00	36,49	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.02.01.025.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	59.900.000,00	21.858.350,00	38.041.650,00	36,49	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.02.01.12	PEMBENTUKAN PASKIBRAKA	2.393.050.010,00	2.227.235.290,00	165.814.720,00	93,07	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.02.01.125.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.393.050.010,00	2.227.235.290,00	165.814.720,00	93,07	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	353.583.374.600,00	303.770.616.280,00	49.812.758.320,00	85,91	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.03.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN	353.583.374.600,00	303.770.616.280,00	49.812.758.320,00	85,91	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.03.01.04	PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	353.583.374.600,00	303.770.616.280,00	49.812.758.320,00	85,91	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.03.01.045.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.001.572.200,00	533.770.880,00	467.801.320,00	53,29	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.03.01.045.1.05.	Belanja Hibah	352.581.802.400,00	303.236.845.400,00	49.344.957.000,00	86,00	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	209.474.000,00	105.440.150,00	104.033.850,00	50,33	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.04.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	209.474.000,00	105.440.150,00	104.033.850,00	50,33	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.04.01.03	PELAKSANAAN KEBIJAKAN DIBIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	209.474.000,00	105.440.150,00	104.033.850,00	50,33	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.04.01.035.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	209.474.000,00	105.440.150,00	104.033.850,00	50,33	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	379.586.000,00	311.713.500,00	67.872.500,00	82,11	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.05.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	379.586.000,00	311.713.500,00	67.872.500,00	82,11	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.05.01.01	PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	379.586.000,00	311.713.500,00	67.872.500,00	82,11	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.05.01.015.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	129.586.000,00	61.713.500,00	67.872.500,00	47,62	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.05.01.015.1.05.	Belanja Hibah	250.000.000,00	250.000.000,00	-	100,00	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.045.367.000,00	933.775.200,00	111.591.800,00	89,32	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.06.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.045.367.000,00	933.775.200,00	111.591.800,00	89,32	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / BERKURANG		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.06.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.045.367.000,00	933.775.200,00	111.591.800,00	89,32	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.06.01.04	PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	227.484.000,00	176.470.200,00	51.013.800,00	77,57	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.06.01.045.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	227.484.000,00	176.470.200,00	51.013.800,00	77,57	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.06.01.06	PELAKSANAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH PROVINSI	817.883.000,00	757.305.000,00	60.578.000,00	92,59	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.06.01.065.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	817.883.000,00	757.305.000,00	60.578.000,00	92,59	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(362.941.754.088,00)	(311.727.450.663,00)	(51.174.403.425,00)	85,88	
	JUMLAH BELANJA	362.956.754.088,00	311.762.400.663,00	51.194.353.425,00	85,89	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(362.941.754.088,00)	(311.727.450.663,00)	(51.174.403.425,00)	85,88	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H.
NIP. 19660918 198602 1 001

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.349.303.848.972,00	2.249.933.589.108,76	526.153.898.984,00	469.664.524.470,55				
1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.753.755.467.738,00	1.716.830.329.439,00	313.164.207.948,00	307.376.627.143,00				
1.01.1.01.0.00.0. 00.01.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.753.755.467.738,00	1.716.830.329.439,00	313.164.207.948,00	307.376.627.143,00				
1.01.1.01.0.00.0. 00.01.01.	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.183.359.068.477,00	1.161.417.766.339,00	487.730.544,00	4.522.000,00				
1.01.1.01.0.00.0. 00.01.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	146.000.000,00	142.408.532,00	0,00	0,00				
1.01.1.01.0.00.0. 00.01.01.01.01.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00				
1.01.1.01.0.00.0. 00.01.01.01.01.0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00				
1.01.1.01.0.00.0. 00.01.01.01.01.0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00				
1.01.1.01.0.00.0. 00.01.01.01.01.0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	32.500.000,00	32.499.400,00	0,00	0,00				
1.01.1.01.0.00.0. 00.01.01.01.01.0 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.500.000,00	7.495.900,00	0,00	0,00				

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.06.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	227.484.000,00	176.470.200,00	0,00	0,00				
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.06.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	817.883.000,00	757.305.000,00	0,00	0,00				
Jumlah		3.724.779.972.557,00	3.466.672.237.776,76	597.533.714.710,00	533.959.803.121,55	45.890.056.001,00	3.331.110.441,00	791.542.326.082,00	730.459.771.539,00

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H,
NIP. 19660918 198602 1 001

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	SKPD	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 - 6
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Piutang Lain-lain PAD yang Sah		459.220.074,00		459.220.074,00
2	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	19.763.019.233,00	20.666.877.741,00	17.443.070.396,00	22.986.826.578,00
3	Dinas Kesehatan	Piutang Lain-lain PAD yang Sah		584.281.400,00		584.281.400,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Piutang Lain-lain PAD yang Sah		428.285.167,00	2.292.136,00	425.993.031,00
5	Dinas Sosial	Piutang Lain-lain PAD yang Sah		44.405.000,00		44.405.000,00
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Piutang Retribusi Daerah	37.256.000,00	18.400.000,00	13.300.000,00	42.356.000,00
7	Dinas Perhubungan	Piutang Lain-lain PAD yang Sah		13.650.000,00		13.650.000,00
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Piutang Retribusi Daerah		1.050.000,00		1.050.000,00
9	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi NTT	Piutang Retribusi Daerah	4.675.000,00		4.675.000,00	-
10	Dinas Kelautan dan Perikanan		365.307.825,00	422.233.699,00	54.230.754,17	733.310.769,83
		Piutang Retribusi Daerah	363.689.075,00	336.794.500,00	53.782.804,17	646.700.770,83
		Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.618.750,00	85.439.199,00	447.950,00	86.609.999,00
11	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Piutang Retribusi Daerah		37.700.000,00		37.700.000,00
12	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Piutang Retribusi Daerah	477.625.000,00	300.000,00	18.290.000,00	459.635.000,00
13	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	Piutang Lain-lain PAD yang Sah		27.000.000,00		27.000.000,00
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		-	7.784.000,00	-	7.784.000,00
		Piutang Retribusi Daerah		4.000.000,00		4.000.000,00
		Piutang Lain-lain PAD yang Sah		3.784.000,00		3.784.000,00
15	Sekretariat Daerah Provinsi NTT		5.200.000,00	25.886.000,00	5.200.000,00	25.886.000,00
		Piutang Retribusi Daerah	5.200.000,00	8.000.000,00	5.200.000,00	8.000.000,00
		Piutang Lain-lain PAD yang Sah		17.886.000,00		17.886.000,00

No.	SKPD	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 - 6
16	Badan Pendapatan dan Aset Daerah		7.344.592.884,88	66.068.779.468,18	64.124.148,00	73.349.248.205,06
		Piutang Pajak Daerah	1.175.473.484,10	65.367.674.968,00	12.402.658,00	66.530.745.794,10
		Piutang Retribusi Daerah	1.350.175.490,00	80.175.000,00	37.221.490,00	1.393.129.000,00
		Piutang Lain-lain PAD yang Sah	4.818.943.910,78	620.929.500,18	14.500.000,00	5.425.373.410,96
17	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		1.402.342.165,00	-	1.132.467.152,00	269.875.013,00
		Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-			-
		Piutang Lainnya	1.402.342.165,00		1.132.467.152,00	269.875.013,00
	TOTAL		29.400.018.107,88	88.805.852.549,18	18.737.649.586,17	99.468.221.070,89

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H.
NIP. 19660918 198602 1 001

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	2	3	4	5
1.	Piutang Pajak Daerah	66.530.745.794,10	(1.138.626.180,10)	65.392.119.614,00
2.	Piutang Retribusi Daerah	2.592.570.770,83	(2.340.228.521,46)	252.342.249,37
3.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	30.075.029.492,96	(7.416.142.049,99)	22.658.887.442,97
4.	Piutang Lainnya	269.875.013,00	(269.875.013,00)	-
	TOTAL	99.468.221.070,89	(11.164.871.764,55)	88.303.349.306,34

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H.
NIP. 19660918 198602 1 001

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan / Lembaga / Pihak Ketiga	Dasar hukum penyertaan	Bentuk penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	Jumlah penyertaan modal daerah	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan awal tahun	Penyertaan modal tahun ini	Jumlah modal yang disertakan sampai dengan akhir tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang telah diterima kembali sampai tahun ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13 = 9-12
I	Investasi Permanen				1.057.275.813.000,00	697.034.363.000,00	-	697.034.363.000,00	360.241.450.000,00	31.749.907.192,00	-	697.034.363.000,00
	1983 s/d 2022	PT. Bank NTT	Perda	Penyertaan Modal pada Bank NTT	766.249.000.000,00	525.007.550.000,00	-	525.007.550.000,00	241.241.450.000,00	24.954.808.444,00	-	525.007.550.000,00
	1987 s/d 2017	PT. Flobamor	Perda	Penyertaan Modal pada PD. Flobamor	19.426.813.000,00	19.426.813.000,00	-	19.426.813.000,00	-	-	-	19.426.813.000,00
	2009 S/D 2017	PT. Askrida	Perda	Saham	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	-	1.600.000.000,00	-	-	-	1.600.000.000,00
	2012 S/D 2022	PT. Jamkrida	Perda	Saham	175.000.000.000,00	129.000.000.000,00	-	129.000.000.000,00	46.000.000.000,00	6.795.098.748,00	-	129.000.000.000,00
	2021	PT. KI Bolok	Perda	Penyertaan Modal KI Bolok	95.000.000.000,00	22.000.000.000,00	-	22.000.000.000,00	73.000.000.000,00	-	-	22.000.000.000,00
II	Investasi Non Permanen				92.122.185.016,00	92.122.185.016,00	-	92.122.185.016,00	-	181.196.786,00	92.075.310.003,00	46.875.013,00
	2003 s/d 2019	PNS Lingkup Pemprov. NTT	Perda APBD	Kredit Kendaraan Roda 2	48.692.760.000,00	48.692.760.000,00	-	48.692.760.000,00	-	-	48.692.760.000,00	-
	2007 s/d 2021	PNS Lingkup Pemprov. NTT	Perda APBD	Kredit Kendaraan Roda 4	43.429.425.016,00	43.429.425.016,00	-	43.429.425.016,00	-	181.196.786,00	43.382.550.003,00	46.875.013,00
Total					1.149.397.998.016,00	789.156.548.016,00	-	789.156.548.016,00	360.241.450.000,00	31.931.103.978,00	92.075.310.003,00	697.081.238.013,00

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H.
NIP. 19660918 198602 1 001

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.945.547.572.903,09	1.497.123.835.515,13	469.404.786.052,71	2.973.266.622.365,51
2	RSUD Prof Dr W Z Johannes Kupang	193.439.248.554,46	48.637.607.812,12	33.352.730.346,45	208.724.126.020,13
3	Dinas Kesehatan	163.765.674.674,98	11.845.770.956,68	14.548.746.521,69	161.062.699.109,97
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	4.047.117.813.889,19	188.762.462.488,85	377.696.931.357,36	3.858.183.345.020,68
5	Satuan Polisi Pamong Praja	936.102.149,98	-	304.277.226,17	631.824.923,81
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.497.613.794,44	458.023.120,01	154.834.950,16	3.800.801.964,29
7	Dinas Sosial	45.204.614.991,88	11.334.765.082,74	8.739.150.423,30	47.800.229.651,32
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.406.548.908,52	642.172.572,00	392.616.294,37	2.656.105.186,15
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	118.391.700.123,67	1.019.527.628,61	10.965.316.719,08	108.445.911.033,20
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		608.336.251,00	128.804.299,95	479.531.951,05
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.990.081.797,83	62.188.600,01	327.415.204,07	9.724.855.193,77
12	Dinas Perhubungan	141.963.963.556,24	25.834.388.023,53	15.109.972.636,13	152.688.378.943,64
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.375.760.209,75	781.579.749,00	469.070.830,90	5.688.269.127,85
14	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah		9.106.556.282,00	989.129.735,64	8.117.426.546,36
15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	21.239.840.305,57	106.773.000,00	560.913.824,69	20.785.699.480,88
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15.197.885.357,51	168.839.002,86	451.910.554,64	14.914.813.805,73
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	256.646.003.922,21	3.196.923.791,07	975.285.857,81	258.867.641.855,47
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	15.869.912.717,88	492.438.287,78	848.486.930,58	15.513.864.075,08
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	176.787.745.843,68	180.500.068.276,80	88.173.987.875,74	269.113.826.244,74
20	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	47.168.591.050,11	1.430.356.512,39	11.335.380.471,36	37.263.567.091,14
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	97.588.965.431,87	7.831.947.405,66	8.280.430.953,60	97.140.481.883,93
22	Dinas Peternakan	67.400.901.427,84	601.095.748,09	2.220.182.120,41	65.781.815.055,52

No.	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
23	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	31.927.885.067,69	1.283.419.350,00	2.512.696.412,84	30.698.608.004,85
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	28.924.004.654,57	12.104.171.730,62	7.224.031.721,08	33.804.144.664,11
25	Sekretariat Daerah	412.063.642.630,45	6.393.431.757,42	18.861.732.825,27	399.595.341.562,60
26	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	54.503.895.956,66	9.313.624.893,01	1.391.857.338,58	62.425.663.511,09
27	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1.644.779.909,71	194.516.221,79	223.536.535,00	1.615.759.596,50
28	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	1.329.289.779.296,44	12.452.295.211,32	474.323.188.942,46	867.418.885.565,30
29	Badan Keuangan Daerah	791.114.209,19	395.645.675,00	617.244.966,94	569.514.917,25
30	Badan Kepegawaian Daerah	1.088.780.869,60	118.747.540,00	765.001.631,40	442.526.778,20
31	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	29.899.779.184,33	1.466.015.717,42	1.160.711.411,01	30.205.083.490,74
32	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	247.646.566,91	-	72.156.040,15	175.490.526,76
33	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	15.612.834.933,27	4.390.617.448,24	4.763.496.759,66	15.239.955.621,85
34	Inspektorat Daerah	12.834.440.698,10	91.426.445,99	926.005.482,36	11.999.861.661,73
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14.210.071.614,30	89.373.430,83	83.909.599,43	14.215.535.445,70
TOTAL		9.308.575.197.201,92	2.038.838.941.527,97	1.558.355.930.852,99	9.789.058.207.876,90

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H.
NIP. 19660918 198602 1 001

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024
			Tambah	Kurang	
1	Aset Tetap Tanah	2.935.540.314.812,51	353.004.524.003,00	521.538.133.482,00	2.767.006.705.333,51
2	Aset Tetap Peralatan dan Mesin	1.983.477.478.890,68	200.756.164.173,09	15.210.344.557,40	2.169.023.298.506,37
3	Aset Tetap Gedung dan Bangunan	2.461.271.590.017,84	1.068.921.450.290,81	60.877.229.553,97	3.469.315.810.754,68
4	Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	6.819.220.982.207,81	234.503.699.073,92	5.528.371.440,53	7.048.196.309.841,20
5	Aset Tetap Lainnya	245.951.097.870,39	26.816.214.542,44	2.408.586.453,00	270.358.725.959,83
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	185.895.865.804,05	18.502.424.539,73	60.158.070.405,94	144.240.219.937,84
7	Akumulasi Penyusutan	(5.322.782.132.401,36)	(892.635.194.960,15)	(136.334.464.904,98)	(6.079.082.862.456,53)
Jumlah		9.308.575.197.201,92	1.009.869.281.662,84	529.386.270.987,86	9.789.058.207.876,90

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H.
NIP. 19660918 198602 1 001

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN
PER 31 DESEMBER 2024

[illegible]

NO.	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI								REKLASIFI KASI/PENG HAPUSAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2024
			BERTAMBAH				BERKURANG					
			ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN		
18	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	908.098.297,00		326.655.648,20								1.234.753.945,20
19	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	15.464.521.900,00										15.464.521.900,00
JUMLAH		185.895.865.804,05	-	14.159.859.189,73	4.335.565.350,00	7.000.000,00	1.707.125.200,00	53.101.704.755,94	5.349.240.450,00	-	-	144.240.219.937,84

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIDANG HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H.
NIP. 19660918 198602 1 001

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2024

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6= 3+4-5
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.927.346.269,72	110.140.100,00	526.296.384,87	5.511.189.984,85
2	RSUD Prof Dr W Z Johannes Kupang	413.926.139,00	16.925.000,00		430.851.139,00
3	Dinas Kesehatan	6.118.435.145,20	1.690.000,00	4.612.282.000,00	1.507.843.145,20
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	11.303.962.828,58	261.840.400,00	2.429.205.918,07	9.136.597.310,51
5	Satuan Polisi Pamong Praja	-			-
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	23.831.775,00	1.273.593.750,00	1.270.783.750,00	26.641.775,00
7	Dinas Sosial	10.140.000,80	7.315.000,00		17.455.000,80
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		1.560.000,00		1.560.000,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	1.260.000,00		1.260.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	882.268.846,32	12.230.000,00		894.498.846,32
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	533.464.340,00	12.115.000,00		545.579.340,00
12	Dinas Perhubungan	1.626.017.850,00	6.300.000,00		1.632.317.850,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	132.646.902,00	1.400.000,00	38.172.208,00	95.874.694,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		8.632.100,00		8.632.100,00
15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.038.979.600,00	5.325.000,00	426.260.000,00	618.044.600,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	113.416.441,85	1.022.000,00	2.128.600,00	112.309.841,85
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	37.950.000,00	70.398.874,53	59.782.155,90	48.566.718,63
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	830.004.300,00		19.735.500,00	810.268.800,00
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.047.974.500,00	2.178.353.836,46	1.076.565.810,00	3.149.762.526,46
20	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3.710.103.200,00	1.440.000,00		3.711.543.200,00
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	8.011.809.464,92	259.744.551,00	155.402.548,56	8.116.151.467,36
22	Dinas Peternakan	200.659.923,00		4.998.000,00	195.661.923,00
23	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	24.068.995.944,07	1.275.829.350,00	1.290.732.270,00	24.054.093.024,07
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.327.964.000,00	2.305.000,00		1.330.269.000,00
25	Sekretariat Daerah	3.292.003.670,88	336.893.866,01		3.628.897.536,89

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6= 3+4-5
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.327.964.000,00	2.305.000,00		1.330.269.000,00
25	Sekretariat Daerah	3.292.003.670,88	336.893.866,01		3.628.897.536,89
26	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	256.870.915,00		256.870.915,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	-	39.724.375,00		39.724.375,00
28	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	310.818.265.199,02	220.499.430,00	110.891.442,09	310.927.873.186,93
29	Badan Keuangan Daerah	10.376.010.168,00	436.564.775,00	9.523.322.000,00	1.289.252.943,00
30	Badan Kepegawaian Daerah	16.538.449,61	5.715.999,99		22.254.449,60
31	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	131.920.000,00			131.920.000,00
32	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	-	12.810.000,00		12.810.000,00
33	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	3.965.000,00	17.710.000,00		21.675.000,00
34	Inspektorat Daerah	10.000.000,00	1.710.000,00	3.639.999,99	8.070.000,01
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.894.000,00	7.240.000,00	9.400.000,00	7.734.000,00
Jumlah		393.018.493.957,97	6.845.159.322,99	21.559.598.587,48	378.304.054.693,48

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H.

NIP. 19660918 198602 1 001

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
PER 31 DESEMBER 2024

No.	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan Yang Direncanakan	Saldo Awal	Transfer dari Kas Daerah	Transfer ke Kas Daerah	Saldo akhir	Sisa dana yang belum dicadangkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pemilihan Kepala daerah Tahun 2024	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024	486.250.000.000,00	203.511.200.000,00	-	203.511.200.000,00	-	-
Jumlah			486.250.000.000,00	203.511.200.000,00	-	203.511.200.000,00	-	-

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H.
NIP. 19660918 198602 1 001

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
PER 31 DESEMBER 2024

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	201.458.557,00	436.070.688,00	201.458.557,00	436.070.688,00
2	Utang Bunga Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	55.688.549.678,00	45.397.745.235,00	55.688.549.678,00	45.397.745.235,00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	159.640.544.216,00	159.291.542.148,00	159.640.544.216,00	159.291.542.148,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka	2.090.653.209,23	4.872.602.258,20	1.801.299.052,56	5.161.956.414,87
5	Utang Belanja	181.338.426.056,85	107.546.422.458,60	180.873.797.406,85	108.011.051.108,60
	- Utang Belanja Pegawai	1.146.531.396,09	3.161.311.183,00	1.146.531.396,09	3.161.311.183,00
	- Utang Belanja Barang dan Jasa	21.433.326.583,76	24.135.411.473,63	21.433.326.583,76	24.135.411.473,63
	- Utang Belanja Hibah		6.563.114,00		6.563.114,00
	- Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	319.823.500,00	42.976.800,00	319.823.500,00	42.976.800,00
	- Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan		972.580.307,53		972.580.307,53
	- Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	464.628.650,00			464.628.650,00
	- Utang Belanja Aset Tetap Lainnya		69.409.985,44		69.409.985,44
	- Utang Belanja Bagi Hasil	157.974.115.927,00	79.158.169.595,00	157.974.115.927,00	79.158.169.595,00
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	-
	- Hutang Taspen	-			-
	- Hutang Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	-			-
	- Hutang Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	-			-
Jumlah		398.959.631.717,08	317.544.382.787,80	398.205.648.910,41	318.298.365.594,47

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H.
NIP. 19660918 198602 1 001

LAMPIRAN XVIII PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 5 TAHUN 2025
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2025

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
PER 31 DESEMBER 2024

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6= 3+4-5
1	Utang Kepada LKBB-BUMN- Jangka Menengah-PT. SMI	796.457.512.834,00	-	162.742.727.202,00	633.714.785.632,00
	Jumlah	796.457.512.834,00	-	162.742.727.202,00	633.714.785.632,00

GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H.
NIP. 19660918 198602 1 001

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024
DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Jumlah				Jumlah yang masih harus dianggarkan kembali pada APBD Tahun berikutnya	Dasar Hukum
			Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Tambah/Kurang	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
N I H I L								
JUMLAH			-	-	-	-	-	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H.
NIP. 19660918 198602 1 001

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
IKHITISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No.	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Aset Lainnya	Total Aset	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYDS c)	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5+6+7	9	10	11 = 9+10	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 x 18
I	Bidang Perbankan																	
	PT. Bank NTT	2	S	2.123.731.992.146,00	13.928.950.969.270	381.778.566.593	16.434.461.528.009	13.733.991.728.321		13.733.991.728.321	2.114.550.860.000	11.747.108.586	24.954.808.444	(68.224.203.763)	642.396.034.865	2.700.469.799.688	24,83	670.526.651.263
II	Bidang Perdagangan																	
	PT. Flobamor	2	S	9.118.847.098	9.585.894.685	961.552.039	19.666.293.822	13.441.688.967	7.523.603.466	20.965.292.433	25.036.265.942	-	-	-	(26.479.296.320)	(1.443.030.378)	99,90	-
III	Bidang Penjamin Kredit																	
	PT. Jamkrida	2	S	142.964.102.242	118.058.837.990		261.022.940.232	31.947.696.957	68.001.486.893	99.949.183.850	129.100.000.000		6.795.098.748	16.994.082.517	14.979.673.865	161.073.756.382	99,98	161.041.541.631
IV	Bidang Kawasan Perindustrian																	
	KI Bolok	2	S	8.012.916.920	5.558.838.246	179.570.000	13.751.325.166	252.032.194	-	252.032.194	22.000.000.000		-	80.680.002	(8.581.387.030)	13.499.292.972	100,00	13.499.292.972
Total Seluruh Bidang				2.283.827.858.406	14.062.154.540.191	382.919.688.632	16.728.902.087.229	13.779.633.146.439	75.525.090.359	13.855.158.236.798	2.290.687.125.942	11.747.108.586	31.749.907.192	(51.149.441.244)	622.315.025.380	2.873.599.818.664	-	845.067.485.865

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

E. MELKIADES LAKA LENA

Sahlan sesuai dengan aslinya
KEPALA BUREAU HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A., M.H.
NIP. 19660918 198602 1 001

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
IKHITISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No.	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Pendapatan	Beban	Laba (Rugi) Kotor	Pendapatan di Luar Usaha	Beban di Luar Usaha	Laba (Rugi) Sebelum Pajak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Bidang Perbankan								
	PT. Bank NTT	2	S	1.217.369.334.319,00	991.652.053.427,00	225.717.280.892,00	30.179.610.317,00	24.788.221.444,00	231.108.669.765,00
II	Bidang Perdagangan								
	PT. Flobamor	2	S	16.621.571.754,00	13.030.589.800,00	3.590.981.954,00	9.357.891,00	3.717.130.239,00	(116.790.394,00)
III	Bidang Penjamin Kredit								
	PT. Jamkrida	2	S	34.242.008.766,00	15.812.039.439,00	18.429.969.327,00	157.576.308,00	343.504.051,00	18.244.041.584,00
IV	Bidang Kawasan Perindustrian								
	KI Bolok	2	S	917.794.686,00	1.735.269.995,00	(817.475.309,00)	30.295.983,00	258.000,00	(787.437.326,00)
Total Seluruh Bidang				1.269.150.709.525,00	1.022.229.952.661,00	246.920.756.864,00	30.376.840.499,00	28.849.113.734,00	248.448.483.629,00

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A., M.H.
NIP. 19660918 198602 1 001